

Riset tentang Dampak Sosial Kebencanaan di Indonesia: Sebuah Perspektif Filosofis dan Metodologis¹

Rissalwan Habdy Lubis²

Keywords: social perspective, disaster research, social capital

Abstract

As a country which is prone to various kinds of disasters, Indonesia needs to develop research-based strategy to minimize impact of disaster, especially to reduce the number of victims. Disaster research on social impact is one of academic domain which provides intellectual space to focusing the specific theme related to disaster as well as widening the horizon of multidisciplinary issues. In conjunction with the effort to make social perspective in disaster research more clear, understandable and useful for direct stakeholders of disaster, this article try to depict the philosophical foundation of social research on disaster and its relation with methodological framework as well. The philosophical matter will elaborate social perspective on disaster and key concept of social capital as a bridging to methodological issues.

Bencana adalah suatu situasi dimana cara masyarakat untuk hidup secara normal telah gagal sebagai akibat dari peristiwa kemalangan luar biasa, baik karena peristiwa alam ataupun perbuatan manusia (*Sphere Project*, 2000). Dalam konteks ini, bencana menjadi fokus yang sangat penting karena ia terkait dengan manusia dan kepentingannya. Artinya, bencana secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada relasi sosial antar manusia, pola interaksi dan juga struktur sosial yang ada. Oleh karena itu—tanpa bermaksud mengecilkan makna bencana berdampak minor—permasalahan bencana yang terjadi wilayah yang lebih banyak dihuni manusia, yakni di perkotaan tampaknya perlu mendapat perhatian lebih, terutama terkait dengan dampak bencana yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peristiwa bencana di luar wilayah perkotaan.

German Velasquez dkk.³ (dalam Inoguchi, Newman & Paoletto, 2003: 198-199) menegaskan beberapa alasan mengapa permasalahan bencana di perkotaan menjadi sedemikian penting untuk diperhatikan:

- *Pertama* menyangkut masalah perubahan sosial yang relatif lebih cepat dalam bentuk interaksi sosial maupun mobilitas horizontal penduduk kota. Kondisi ini merupakan kombinasi yang sangat sempurna dari besarnya jumlah manusia yang ada di kota. Sehingga

¹ Disampaikan dalam “Two-days Indonesian National Seminar and Workshop of Disaster Impacts and Research”, 3-4 November 2010 di Hotel Lumire, Jakarta.

² Pengajar dan Peneliti di Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI; Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni FISIP UI; Direktur Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial (LKPS).

³ Sebuah paper bersama yang berjudul “Sebuah Pendekatan Baru Mitigasi Bencana Alam dan Perencanaan Kota: Kerawanan Sosial dalam Manajemen Risiko Bencana Alam”.

jika bencana terjadi, korban bencana bisa saja menjadi semakin bertambah banyak akibat dari kekacauan dan kepanikan dari orang-orang yang berada di dekat lokasi tersebut.

- *Kedua* adalah permasalahan investasi infrastruktur yang sangat besar. Jadi selain mengakibatkan jumlah korban manusia yang relatif lebih banyak, kerugian fisik dan ekonomi pun tentu saja akan berlipat ganda jumlahnya.
- *Ketiga* yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan kelembagaan formal di perkotaan yang dapat menjamin berjalannya manajemen bencana yang efektif dan efisien.

Dalam kasus bencana yang terjadi di DKI Jakarta, 2 alasan pertama tampaknya sudah sangat jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Seandainya saja terjadi bencana gempa yang dahsyat di wilayah Jakarta, maka korban jiwa dan harta pastilah akan sangat signifikan jumlahnya. Akan tetapi aspek kelembagaan pada poin ketiga, yang idealnya dapat berperan sebagai faktor antisipatif, tampaknya belum dapat dipastikan apakah dapat bekerja secara optimal dalam menanggulangi bencana atau justru sebaliknya, memperkeruh keadaan saat bencana dengan kejadian mis-koordinasi dan sebagainya.

Namun sebelum lebih jauh membahas tentang dampak sosial suatu peristiwa bencana, ada baiknya disepakati terlebih dahulu pemahaman tentang kebencanaan dalam perpektif ilmu-ilmu sosial. Hal ini penting, bukan untuk mensegregasi cara berpikir, melainkan untuk memahami landasan filosofi yang akan mengantarkan kita pada pemahaman terhadap metodologi riset sosial kebencanaan dalam perspektif ilmu sosial.

Definisi Ilmu Sosial tentang Bencana

Quarantelli (1998) pernah menantang para ilmuwan sosial untuk mendefinisikan bencana dari sudut pandang ilmu sosial. Beberapa ilmuwan sosial menjawab tantangan tersebut dengan mengirimkan naskah akademik mereka, yang kemudian dibukukan dengan judul "*What is Disaster? Perspective on the Question*" yang diterbitkan oleh *Routledge*. Salah satu definisi yang sederhana dan mudah dipahami adalah yang dikemukakan Kreps (dalam Quarantelli, 1998) yang menyebutkan bahwa bencana menyangkut 2 aspek yakni: kejadian sistemik (*systemic events*) dan katalis sosial (*social catalyst*).

Aspek kejadian sistemik dapat dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang melibatkan suatu peristiwa dramatik yang akan menjadi momen bersejarah bagi generasi-generasi berikutnya. Seperti misalnya bencana meletusnya Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 yang tidak hanya berpengaruh di wilayah Indonesia, tetapi juga hingga radius ribuan kilometer dari pusat letusan (Winchester, 2006). Tetapi mengapa kejadian sistemik ini hanya terkait dengan fenomena sosial dan tidak melingkupi juga konteks yang lainnya seperti misalnya fisik lingkungan dan sebagainya?

Kejadian sistemik menjadi hanya terkait dengan fenomena sosial karena bencana bukan hanya berdampak langsung pada korban yang menjadi korban ketika peristiwa bencana berlangsung, tetapi juga akan catatan sejarah yang menciptakan suatu persepsi bersama bahwa

melukai dan membunuh banyak orang dengan jumlah yang signifikan sehingga membuat orang yang mengetahui catatan sejarah itu menjadi lebih waspada terhadap peristiwa bencana yang sama maupun yang lainnya. Perspektif kesejarahan ini penting dalam studi kebencanaan secara sosial karena sejarah merupakan suatu konstruksi sosial, yang merupakan agresi dari pengalaman dan memori individu yang disampaikan secara lisan maupun tulisan.

Untuk mempertegas maksud penjelasan ini, coba kita bandingkan peristiwa meletusnya gunung merapi di tahun 1883 dengan letusan purba yang terjadi di gunung yang kemudian menjadi Danau Toba di Sumatera Utara.⁴ Meskipun kedua peristiwa tersebut secara teknis bisa dikatakan sama, yakni letusan gunung berapi, namun dalam perspektif ilmu sosial letusan gunung berapi di Danau Toba tidak termasuk bencana karena tidak memiliki catatan yang jelas tentang dampaknya terhadap manusia. Sama halnya letusan Gunung Kilauea di Hawaii yang hampir tidak pernah berhenti mengeluarkan materi dari perut bumi, namun tidak—atau belum—menyebabkan kerusakan dan berdampak langsung pada sistem kehidupan manusia.

Aspek kedua definisi bencana menurut perspektif ilmu sosial adalah katalis sosial. Katalis sosial dapat dipahami sebagai suatu reaksi kolektif terhadap peristiwa yang mengganggu dan merugikan kehidupan manusia. Kreps (dalam Quarantelli, 1998) bahkan menyatakan secara eksplisit bahwa aspek kedua inilah yang menegaskan perbedaan definisi bencana secara teknis dengan bencana dalam perspektif ilmu sosial, karena dalam kerangka ini bencana memiliki hubungan kausalitas yang sangat dengan percepatan dan dinamika sosial serta reaksi sosial yang memperkuat atau mungkin sebaliknya menghancurkan struktur sosial yang ada. Ilustrasi untuk menggambarkan maksud ini adalah perbandingan antara proses pemulihan pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh dengan bencana gempa di Yogyakarta. Dengan mengabaikan skala dan dampak langsung yang terjadi, kedua bencana tersebut telah mendorong terjadinya reaksi perubahan sosial dengan derajat yang berbeda. Artinya, pemahaman bencana dalam konteks ini mulai mengarah pada adanya dampak sosial bencana yang bersifat tidak langsung.

Untuk menegaskan maksudnya tentang definisi bencana dalam kerangka dampak sosial, Kreps (dalam Quarantelli, 1998) mengemukakan 4 dimensi penting dalam memahami peristiwa bencana, yakni:

- *Length of forewarning* (jarak waktu peringatan akan bencana)
Waktu yang dibutuhkan sejak identifikasi awal bencana hingga terjadinya dampak bencana di suatu lokasi, merupakan hal yang sangat krusial dalam upaya menekan gangguan sosial yang diakibatkan oleh suatu bencana. Periode waktu ini akan menentukan kesiapan untuk mengurangi resiko bencana, seperti misalnya informasi ketinggian air di bendungan

⁴ Meskipun tidak ada catatan sejarah yang jelas, beberapa ilmuwan geologis berkeyakinan bahwa danau toba terbentuk dari letusan gunung berapi yang diduga merupakan letusan terdahsyat yang pernah terjadi di bumi.

Katulampa-Bogor akan menjadi faktor kesiapsiagaan warga di daerah Kampung Melayu untuk mengantisipasi banjir.

- *Magnitude of Impact* (besarnya dampak)

Derajat atau tingkatan dari dampak bencana mengacu kepada seberapa besar gangguan sosial bencana tersebut telah mengganggu kehidupan rutin atau telah mampu diadaptasi. Misalnya, bagi warga Kampung Pulo di Kampung Melayu banjir rutin kiriman dari Bogor telah mampu diadaptasi dengan membangun rumah bertingkat dan menempatkan barang elektronik di lantai atas. Sehingga banjir dengan ketinggian 1 meter pun belum dapat dikatakan bencana oleh warga Kampung Pulo.

- *Scope of Impact* (cakupan dampak)

Batasan sosio-geografis juga penting untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikatakan bencana atau tidak. Suatu gangguan sosial akan lebih tegas didefinisikan sebagai bencana jika mencakup wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan gangguan sosial yang cakupan wilayahnya lebih sempit. Hal ini menjelaskan mengapa gempa dan tsunami di akhir tahun 2004 yang melanda utara Sumatera dan beberapa Negara lain di wilayah utara Samudera Hindia lebih diketahui dan dingat masyarakat awam daripada peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Pangandaran tahun 2006.

- *Duration of Impact* (lamanya dampak)

Jangka waktu antara dirasakannya gangguan sosial hingga gangguan itu tidak lagi dirasakan juga menentukan definisi sebuah bencana. Semakin lama gangguan sosial dirasakan maka gangguan itu akan lebih dimaknai sebagai bencana karena menghambat segera kembalinya kehidupan normal. Seperti misalnya, meskipun ketinggian air 1 meter yang menggenangi pemukiman warga di Kampung Pulo belum dirasakan sebagai bencana, namun jika air setinggi 1 meter tersebut berlangsung lebih dari 5 hari maka kehidupan dan aktifitas warga tetap akan terganggu, sehingga kondisi tersebut dikatakan sebagai bencana.

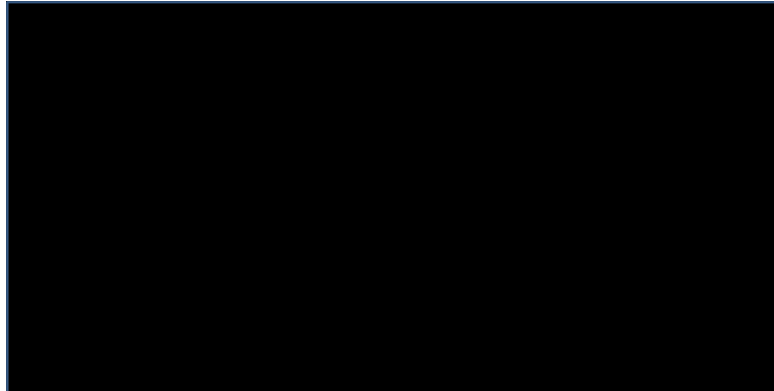
Dampak Sosial Bencana: Sebuah Refleksi Metodologis

Berangkat dari pemahaman yang diberikan Kreps (dalam Quarantelli, 1998) di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial bencana ada yang bersifat langsung berupa gangguan sosial terhadap sistem kehidupan manusia; dan ada dampak tidak langsung berupa dorongan percepatan atau perlambatan dinamika modifikasi struktur sosial. Konsepsi di atas tersebut—secara metodologis, seolah-olah menyatakan bahwa peristiwa bencana pasti merupakan variabel independen, sementara gangguan sosial dan modifikasi struktur sosial pasti merupakan variabel dependen. Lantas apakah riset sosial kebencanaan hanya akan bersifat reaktif terhadap peristiwa bencana dan hanya akan mengkaji dampak setelah bencana saja?

Untuk menjawab pertanyaan metodologis tersebut, ada baiknya kita memahami bahwa bencana mungkin berdampak pada tingkatan yang berbeda. Hal ini mungkin berkaitan dengan dimensi *scope of impact* yang dikemukakan Kreps, tetapi harus lebih progresif lagi

mengidentifikasi dan menganalisis dampak sosial bencana dari tingkat yang paling mikro hingga yang paling makro, sebagaimana diilustrasikan dalam diagram berikut.

Tingkatan Analisis Dampak Sosial Bencana



Sumber: diolah dari Abrahamsson & Nilson dalam Collins (2009)

Pembedaan ini penting untuk membahas hubungan kausalitas antara peristiwa bencana dengan gangguan sosial dan perubahan struktur sosial dapat bersifat satu arah linear atau dapat berbalik arah. Sebagai contoh misalnya pada analisis dampak sosial bencana pada tingkat individu berupa persepsi tentang pemilihan untuk bertempat tinggal di lokasi rawan bencana, dapat dilihat dalam kerangka hubungan dua arah antara variabel kejadian bencana dengan variabel preferensi memilih tempat tinggal di lokasi rawan bencana.

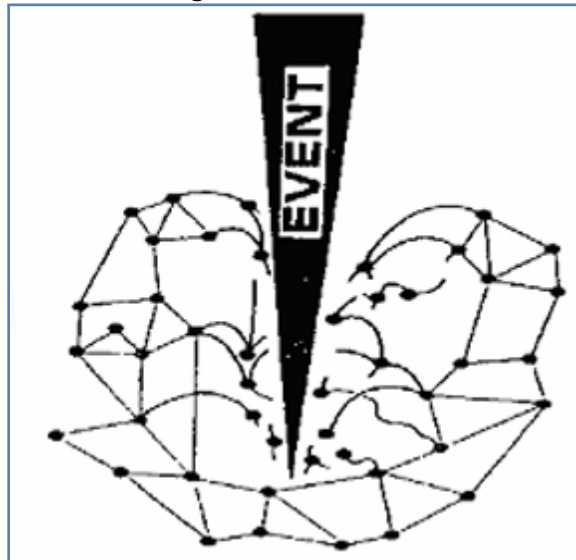
Demikian pula dalam konteks multi tingkatan, analisis dampak juga bisa dilihat bersifat kausal secara vertikal maupun horizontal. Seperti misalnya bencana banjir di Jakarta secara horizontal dapat memiliki dampak berantai, yakni wabah penyakit tertentu, dan kemudian dalam jangka panjang mungkin menurunnya kualitas hidup. Sementara secara vertikal, gangguan pada tingkat struktur sosial tersebut kiranya terkait dengan alasan setiap anggota masyarakat untuk bertempat tinggal di daerah rawan banjir itu. Gangguan sosial berupa banjir itu juga bisa berkaitan dengan kebijakan nasional tentang tata kelola sumber daya air yang masih lemah dan juga lemahnya manajemen kebencanaan.

Jika mengacu pada Kreps (dalam Quarantelli, 1998), hubungan antar variabel dalam suatu riset sosial kebencanaan terkait pada fase bencana itu sendiri. Jika kajiannya lebih kepada dampak bencana, maka peristiwa bencana dan karakteristiknya akan menjadi variabel independen sementara gangguan sosial dan perubahan struktur sosial akan menjadi variabel dependen. Namun hubungan variabel tersebut dapat menjadi sebaliknya, jika kajian sosialnya lebih pada fase pra-bencana seperti misalnya tentang mitigasi, kerentanan dan kesiapsiagaan.

Diskusi metodologis tentang riset sosial kebencanaan mendapat ruang untuk berkembang justru pada tingkat dinamika struktur sosial, dalam konteks dampak maupun penyebab suatu bencana. Konteks dampak terjadi ketika struktur sosial terpaksa berubah karena peristiwa bencana. Sementara konteks penyebab terjadi karena pelapisan atau segregasi dalam struktur sosial justru mengakumulasi potensi konflik yang dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan seperti yang terjadi di Ambon, Poso, Sampit, dan sebagainya.

Terkait dengan konteks perubahan struktur sosial ini, Gordon (2003) menjelaskan secara eksplisit bahwa peristiwa bencana akan merusak ikatan (*debonding*) dalam struktur sosial suatu masyarakat. Rusaknya ikatan struktur sosial tersebut terjadi dalam relasi sosial yang kasat mata maupun relasi sosial yang tidak terlihat (*hidden social relations*). Secara kasat mata kerusakan ikatan sosial struktur sosial tersebut misalnya terpisahnya anggota keluarga ketika proses evakuasi. Hal seperti ini secara dramatis pernah terjadi dalam peristiwa gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, dimana sampai dengan awal akhir tahun 2005 masih banyak orang tua yang mencari anaknya melalui iklan orang hilang di koran-koran lokal.

Kerusakan Ikatan (*debonding*) Struktur Sosial Akibat Peristiwa Bencana



Sumber: Gordon, 2003

Sementara kerusakan relasi sosial yang tidak terlihat justru lebih banyak terjadi, misalnya munculnya ketidakpercayaan dan bahkan kecurigaan diantara sesama penyintas bahwa dirinya tidak diperlakukan secara adil dalam pemberian bantuan pasca bencana. Di Aceh pasca tsunami kasus seperti ini sering bahkan terjadi secara ekstrem dimana sekelompok penyintas sampai tega menyerang dan merusak rumah kelompok penyintas lain yang lebih dahulu mendapat bantuan perbaikan rumah dari UN-Habitat.⁵

Pola lain yang biasanya terjadi dari rusaknya *hidden social relations* adalah dalam bentuk rusaknya solidaritas sosial yang justru mengemuka ketika suatu peristiwa bencana terjadi. Seperti misalnya dalam peristiwa kebakaran pemukiman yang kerap terjadi di Jakarta, banyak orang yang berusaha membantu evakuasi barang-barang (misalnya TV, kulkas, mesin cuci, dll) dari dalam rumah yang belum terbakar. Namun ketika kebakaran telah usai, barang yang

⁵ Dalam laporan monitoring dan evaluasi kegiatan ANSSP (Aceh Nias Settlement Support Project) di Aceh Besar, tahun 2006.

dievakuasi tersebut tidak dapat ditemukan lagi oleh pemiliknya (Lubis, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa kohesi sosial sudah sedemikian lemah, sehingga peristiwa bencana menjadi momentum bagi rusaknya ikatan sosial yang tak terlihat dalam bentuk “penjarahan terselubung” atas nama solidaritas untuk membantu.

Modal Sosial untuk Mengantisipasi Dampak Sosial Bencana

Keluasan ruang pengembangan metodologis dalam riset sosial kebencanaan di tingkat kajian struktur sosial membutuhkan suatu landasan konsep yang kuat. Salah satu landasan konsep yang dikembangkan dalam riset kebencanaan belakangan ini adalah konsep modal sosial (Lubis, 2007; 2008; 2009). Dalam kajian ilmu sosial, hubungan dalam struktur masyarakat memang terkait erat dengan konsep modal sosial. Sebagaimana diutarakan oleh Lawang (2005), bahwa modal sosial adalah sesuatu yang melekat (*embedded*) dalam struktur sosial masyarakat. Jadi dalam setiap entitas struktur sosial pasti ada energi potensial modal sosial yang pada dasarnya menjadi ruh dari struktur sosial itu sendiri.

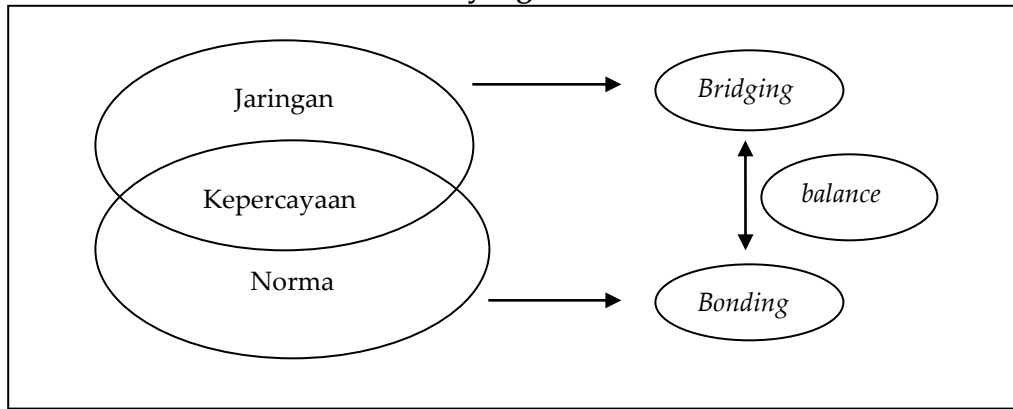
Modal sosial mencakup tiga unsur penting (Putnam et.all, 1995; Woolcock, 1998), yakni: *trust* (kepercayaan), *norms* (norma-norma), dan *networks* (jaringan). Kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak. yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1995; 2002).

Sementara norma, menurut Coleman (1990), “*specify what actions are regarded by a set of persons as proper or correct, or improper or incorrect*”. Dengan kata lain, sebuah norma menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Norma ini kemudian diekspresikan dalam bentuk bahasa formal maupun informal sebagai semacam kebijakan, sehingga semua orang yang memiliki norma ini harus menyadari keberadaan dan isi kebijakan tersebut. Maka itu, norma hanya akan muncul jika ada komunikasi dan keberadaannya.

Sedangkan jaringan menurut Putnam (1995) justru menjadi dasar berkembangnya konsepsi modal sosial yang menunjukkan eksistensi struktur sosial yang terus berkembang. Unsur jaringan dalam modal sosial dapat mengantarkan suatu entitas sosial kepada akses modal yang lain, seperti misalnya peningkatan modal fisik dan modal manusia (Lubis, 2006).

Ketiga unsur modal sosial tersebut dapat dikombinasi menjadi pola modal sosial yang spesifik, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut.

Formasi Unsur Modal Sosial yang Membentuk Pola Modal Sosial



Sumber: Lubis, 2008

Pemahaman makna *bonding* dan *bridging* ini penting untuk menegaskan karakteristik identitas sosial dari kedua pola tersebut. Putnam (2000 dalam Halpern, 2005) mengemukakan:

"Some forms of capital are, by choice or necessity, inward looking, and to reinforce exclusive identities and homogeneous groups. Example of bonding social capital include ethnic fraternal organization, church-based women reading group, and fashionable country clubs. Other networks are outward looking and encompass people across diverse social cleavage. Example of bridging social capital include the civil rights movements, many youth service groups, and ecumenical religious organization,.....bonding social capital provides a kind of sociological superglue whereas bridging social capital provides sociological WD-40."

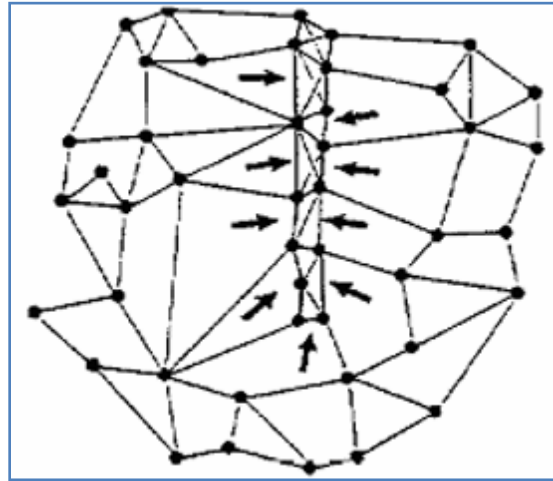
Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa pola *bonding* dari modal sosial akan cenderung memperkuat ikatan struktur sosial ke dalam, sedangkan pola *bridging* dari modal sosial akan memperkuat ikatan struktur sosial ke luar.

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa, kombinasi antara unsur jaringan dan kepercayaan akan membentuk pola *bridging social capital*. Pola ini menjelaskan bahwa suatu struktur sosial akan terus berkembang karena meluasnya interaksi dalam jaringan sosial yang didasari oleh *mutual trust*. Pola ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu grup konglomerasi menjalankan bisnis yang berkembang terus tanpa peduli dengan norma-norma dan juga aturan hukum yang berlaku. Sementara kombinasi antara unsur kepercayaan dan norma akan membentuk pola *bonding social capital*. Pola ini menunjukkan bahwa struktur sosial berkecenderungan untuk menggunakan norma yang berbasis kepercayaan untuk menguatkan atau memperbaiki ikatan sosial ke dalam struktur itu.

Jika kita kembali pada logika Gordon (2003) di atas tentang rusaknya ikatan struktur sosial akibat peristiwa bencana, maka peluang untuk memperbaiki ikatan struktur sosial (*rebonding*) dengan memanfaatkan *bonding social capital*. Hal ini sesuai dengan temuan Lubis (2008) bahwa ada kecenderungan yang sangat kuat dalam masyarakat untuk mengedepankan *community self-survival* dari pada mengandalkan sumber daya dan bantuan dari luar. Kondisi

ini menunjukkan kuatnya bentuk *bonding social capital* dalam komunitas daripada *bridging social capital* kepada sumber-sumber bantuan untuk pemulihan bencana dari luar komunitas.

Pengikatan Kembali (*rebonding*) Struktur Sosial yang Rusak Setelah Bencana



Sumber: Gordon, 2003

Jika pada tingkat komunitas pola *bonding social capital* ini positif untuk merevitalisasi ikatan sosial yang telah rusak akibat bencana, maka pada tingkat pemerintahan pola ini bersifat negatif karena akan menghambat daya respons dan kemampuan koordinasi pemerintah dalam membantu masyarakat korban bencana. Namun sayangnya, pemerintah masih saja menerapkan pola ini. Lubis (2009) menemukan bahwa seperti halnya yang terjadi di tingkat komunitas, ternyata di tingkat pemerintah daerah pun pola kemitraan kemitraan penanggulangan bencana pun masih bersifat internal dan sangat berbasis normatif. Hal ini ditunjukkan masih kuatnya index kemitraan *bonding-norms* dalam sebuah studi di 5 wilayah kota di DKI Jakarta.

Konsep modal sosial ini secara substantif, membantu para peneliti sosial bidang kebencanaan untuk memahami suatu fakta sosial dalam bentuk struktur sosial yang dinamis sebagai entitas yang normal. Sehingga ketika entitas yang normal tersebut mengalami gangguan akibat bencana, maka para peneliti sosial dapat memberikan saran yang tepat tentang bagaimana mengembalikan struktur sosial dan kehidupan yang paling tidak kembali mendekati normal.⁶ Terkait dengan signifikansi tersebut, sebagaimana perspektif disiplin ilmu yang lain, kiranya riset sosial kebencanaan tidak bersifat reaktif dan hanya berfokus pada dampak sosial saja. Namun lebih mengembangkan kajian-kajian yang sifatnya pencegahan terhadap dampak bencana yang bersifat aplikatif dan juga mendorong para pemangku kepentingan penanggulangan bencana lebih proaktif di fase pra-bencana. Sehingga hasil-hasil riset kita tidak hanya akan memenuhi lemari-lemari buku di kampus, hingga akhirnya terlupakan begitu saja.

⁶ Mengapa mendekati normal? Karena mungkin saja ada anggota dalam struktur yang tidak bisa kembali karena meninggal. Misalnya tokoh adat yang meninggal atau juga anggota keluarga yang tidak bisa digantikan oleh orang lain.

Daftar Pustaka

- Collins, Andrew E. (2009). **Disaster and Development**. London & New York: Routledge
- Coleman, J. C. (1990). **Foundations of Social Theory**. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Gordon, Rob. (2003). **The Social Dimension of Emergency Recovery**. A paper presented in Australian Disaster Conference 2003.
- Inoguchi, Takashi *et.all.* (2003). **Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi**. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Jewson, Nick & MacGregor, Sussane (*eds.*). (1997). **Transforming Cities: Contested Governance and New Spatial Divisions**. New York: Routledge.
- Lawang, Robert MZ. (2002). **Kapital Sosial**. FISIP UI Press.
- Lubis, Rissalwan Habdy. (2007). **Peran Strategis Kelembagaan Masyarakat Lokal dalam Penanggulangan Bencana Tingkat Komunitas**. *Jurnal KAPAI – Journal of Disaster Management & Environment* (ISSN 0853-845X), No. 45 Th. XII Januari-Maret 2007.
- Lubis, Rissalwan Habdy. (2008). **Pengembangan Modal Sosial Sebagai Mekanisme Penanggulangan Bencana (Disaster Coping Mechanism) Di Tingkat Komunitas**, Laporan Riset Penerima Hibah PHKI C2,1UI-Depok.
- Lubis, Rissalwan Habdy. (2009). **Pengembangan Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Sebagai Strategi Pemulihan Masyarakat Pasca Bencana**, Laporan Riset Penerima Hibah PHKI C2,1UI-Depok.
- Putnam, R. D. (1995). *Bowling Alone: America's Declining Sosial Capital*. **Jurnal of Democracy**, 6:65-78.
- Putnam, R. D. (2000). **Bowling Alone. The collapse and revival of American community**, New York: Simon and Schuster.
- Quarantelli, E.L. (1998). **What is a Disaster?: Perspective on the Question**. London & New York: Routledge
- Winchester, Simon. (2006). **Krakatau: Ketika Dunia Meledak, 27 Agustus 1883**. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Woolcock, Michael. (1998). *Social Capital And Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis And Policy Framework*. **Theory and Society**, 27: 151-208.